

Fachry Ali, MA:

MENEMUKAN IDENTITAS PRIBUMI NEGARA

Sejak tahun 80-an, Islam diterima sebagai bagian yang sah dari sistem Orde Baru yang sebelumnya menempatkan Islam sebagai kelompok ekstrim, dengan fenomena lahir dan menguatnya ICMI, *ijo royo-royo* dsb. yang sering di sebut sebagai “politik akomodasi Islam”. Anda melihatnya sebagai fenomena apa?



Pertama, itu adalah fenomena perubahan wacana politik. Dulu kita menggunakan apa yang dikatakan *mode of colonial thinking*, cara berpikir kolonial. Cara berpikir kolonial adalah cara berpikir di mana kecurigaan selalu diletakkan kepada kekuatan-kekuatan yang berbau agama. Pada masa kolonial kecurigaan pada sikap-sikap agama, kecurigaan terhadap ulama, terhadap organisasi-organisasi yang bersifat agama terjadi. Karenanya pada masa kolonial dulu, atau sebagai implementasi dari kebijaksanaan cara berpikir kolonial ini tadi adalah menjauhkan agama dari peranan-peranan strategis dan terutama di dalam pemerintahan. Orang-orang yang diangkat menjadi bupati adalah orang-orang yang dianggap jauh dari agama. Karenanya mereka ini pada umumnya tidak ingin dikait-kaitkan dengan agama. Nah moda berpikir kolonial ini terus bertahan sampai tahun 70-an, bahkan mungkin tahun 80-an. Jadi tokoh-tokoh utama dan strategis terutama pada awal Orde Baru sangat

menjauhi apa yang berbau agama. Justru mereka lebih aman secara politis kalau mereka dianggap sekular, dianggap *western, westernized style of life*, kalau mereka dianggap Jawa dalam pengertian kejawaan yang suka wayang, yang tidak shalat, kalau mereka dianggap tidak pernah pergi haji dsb. Itu adalah kelanjutan dari moda berfikir kolonial. Kemudian kira-kira tahun 80-an, *mode of colonial thinking* itu berubah menjadi *mode of national thinking*. Faktor kedua adalah bahwa asumsi kultural pada kebangkitan Orde Baru ternyata dianggap salah. Asumsi kultural pada masa Orde Baru itu menganggap *state* atau negara sebagai *agent of development, agent of modernization*. Dan karena *agent of development, agent of modernization* itu hanya bisa diartikulasikan dengan baik dengan menyamakan diri dengan Dunia Barat, maka kiblatnya harus ke Barat. Karena apa yang terjadi di Barat adalah sebuah proses sekularisasi, maka itulah yang dilakukan oleh negara pada awalnya. Jadi mau memodernisasikan masyarakat Indonesia kemudian menampik pentingnya peranan agama. Tetapi ternyata itu salah. Karena asumsinya atau dasar dari tindakan-tindakannya adalah modernisasi. Apa yang terjadi adalah semakin proses modernisasi itu dilakukan oleh negara semakin kuat *ghirah* (*gairah, red.*) keagamaan. Pada tahun 70-an jarang orang memakai jilbab. Tetapi sejak tahun 80-an ke atas

justru kampus-kampus umum ITB, UI, dsb. mengalami proses jilbabisasi. Pada tahun 60-an orang yang sembahyang di ITB *diketawain*. Tapi pada tahun 70-an ke atas justru di sana berdiri sebuah pusat kegiatan keagamaan, apa yang disebut masjid kampus yang pengaruhnya menyebar ke mana-mana. Jadi sebenarnya proses modernisasi itu ternyata menguatkan proses relegiusitas justru di pusat-pusat modernisasi itu sendiri, yakni di kampus, di perkotaan dan di mana saja. Jadi teori tentang modernisasi yang menjadi asumsi dasar dari peranan budaya negara tadi kemudian ditinjau ulang. Yang ketiga, dan yang terpenting adalah negara merasa tidak bisa “berbunyi” pada sebuah lahan kultural yang boleh dikata cangkokan. Cangkokan itu adalah sebuah masyarakat modern. Nah masyarakat modern itu kan terlalu kecil untuk masyarakat Indonesia. Jadi dulu mereka bergerak pada tataran gagasan-gagasan kelompok sekuler yang ingin memodernisasikan Indonesia seperti CSIS dan kelompok-kelompok mahasiswa tertentu. Maka negara berpijak pada kawasan yang kecil itu, sementara kawasan yang besar, kawasan pendukung budaya yang besar yakni pendukung budaya kesantunan (Islam), katakanlah seperti itu, terabaikan. Nah negara semakin lama lalu menyadari: lho saya tidak akan *legitimate*, tidak akan diterima kalau saya hanya berpijak pada latar kultural yang sempit, saya harus keluar dari pelataran itu. Dan dia keluar, kemudian menengok kepada pendukung budaya Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk negara ini. Dari sini untuk sebagian, terjadilah perubahan-perubahan orientasi. Dalam arti lain, negara menjadi kurang idealistis kalau kita lihat dari kaca mata teori modernisasi, dan jauh lebih realistis di dalam memahami masyarakat di sekitarnya. Kalau saya misalnya berada pada sebuah masyarakat Jawa, maka menjadi tidak realistis kalau kemudian saya terlalu menonjolkan sifat ketidakjawaan saya. Yang realistik adalah berusaha memahami bahwa sebagian besar masyarakat kami adalah masyarakat Jawa. Dan saya harus bertingkah laku sesuai dengan orang Jawa. Itu misalnya. Juga demikian dengan negara. Sebagai sebuah institusi,

negara yang tegak pada sebuah masyarakat Islam menjadi sangat ganjil kalau kemudian tingkah laku negara bertentangan dengan budaya mayoritas dari masyarakatnya sendiri. Sesuatu yang realistis adalah memahami dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mayoritas itu. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang Anda katakan, “politik akomodasi Islam” itu: akomodasi hasrat masyarakat Islam untuk mengambil peran tertentu dalam masyarakat, berproses seperti itu.

Yang Anda katakan adalah perubahan cara pandang negara pada kenyataan masyarakatnya dimana mayoritas adalah ummat Islam. Adakah perubahan cara pandang ummat Islam sendiri terhadap negara di mana pencarian sosok negara yang paling sah menurut Islam itu masih berlangsung?

Kalau dulu untuk kalangan “modernis” negara modern itu *taken for granted* saja. Yang penting bagaimana kemudian diberi arti Islamnya. Tokoh-tokoh kalangan Masyumi dulu tidak pernah mempersoalkan apakah negara ini Islam atau tidak Islam. Dan yang penting adalah bagaimana wadah dari negara yang dibangun ini mengalami proses Islamisasi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dari kalangan NU sendiri. Jadi ketika negara modern berdiri mereka mempertanyakan apakah negara ini sah secara fikih. Maka kemudian lahir konsep *waliyyul amri adldlaruri bisysyaukah* itu. Karena alasannya bersifat fikih itu tadi. Sebab peristiwa keagamaan yang bersifat fikih ini akan terus berlangsung setiap hari. Bahwa naib, penghulu itu kan harus menikahkan orang dan proses pernikahan dianggap sebagai suatu yang suci, dianggap berhubungan dengan keagamaan, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Tanggung jawabnya tidak pada manusia tetapi kepada Tuhan. Nah persoalannya, siapa yang harus mengangkat penghulu, kalau bukan oleh pemerintahan Islam. Tapi persoalannya, negara Indonesia yang muncul ini adalah negara *toghut* (berhala, red.) dan bukan negara Islam. Bagaimana dong? Kan negara yang

mengangkat penghulu, lha perkawinan-perkawinan ini sah apa enggak? Karenanya kemudian dimunculkanlah konsep *waliyyul amri* itu. Supaya kemudian pengangkatan para penghulu secara fikih menjadi sah. Jadi ada usaha mensucikan negara. Kalau kita lihat secara antropologis *waliyyul amri adldlaruri bisysyaukah* itu tadi adalah proses pensucian negara. Dari yang dianggap tidak suci menjadi sesuatu yang suci. Sesudah itu dianggap suci kemudian tindakan dia pun dianggap sah secara keagamaan. Jadi ini adalah perkembangan dan dinamika pemikiran keagamaan kalangan santri terhadap wujud eksistensi negara itu tadi. Tetapi semakin lama kita melihat bahwa kaum santri tidak lagi hanya melihat persoalan agama itu dari segi fikih saja. Dengan munculnya apa yang sekarang disebut LSM, maka gagasan-gagasan tentang demokratisasi itu pun dimunculkan. Nah pada saat itulah kemudian proses gagasan-gagasan demokrasi, gagasan pemihakan kepada rakyat mulai menjalar kemana-mana termasuk kalangan generasi muda santri. Dari situlah kemudian timbul arus bahwa Islam jangan hanya menjadi legitimator, faktor pengesah dari apa yang dilakukan oleh negara, tapi harus juga menjadi kekuatan-kekuatan yang kritis kepada negara. Dinamika pemikiran ini bisa sampai pada situasi yang mempertanyakan keabsahan-keabsahan pemikiran-pemikiran keagamaan di masa lalu. Dalam proses pencerahan yang berlangsung terus-menerus ini timbul keinginan untuk melihat lebih kritis konsep-konsep lama. Generasi yang semacam inilah yang akan merekonstruksikan sebuah gagasan-gagasan yang lebih menarik tentang konsep-konsep mereka tentang kenegaraan. Jadi kalau anda berkata negara bisa berubah, maka persepsi yang secara konseptualpun di kalangan Islam, di kalangan santri pun bisa berubah.

Ada orang yang menilai bahwa hubungan baik ummat Islam dan negara itu semata-mata formalitas politik saja, karena Orde Baru telah mengalami krisis legitimasi misalnya dari sayap militer sehingga mereka perlu untuk secara

setrategis merangkul ummat Islam. Menurut Anda bagaimana?

Saya kira orang-orang boleh berpendapat lain tentang itu dan tidak apa-apa. Tapi persoalannya, kita mengatakan sesuatu dalam hal ini hendaknya lebih akademis. Misalnya anda menyebut tentara tadi, pada tahun 80-an tidak terbayangkan akan muncul seorang tentara seperti Hartono misalnya, Pangab Faisal Tanjung atau Prabowo yang lebih realistis melihat Islam. Dan bahkan dalam beberapa hal secara lebih terang-terangan mereka mengemukakan simpatinya kepada Islam. Jadi kalau kenyataan ini berlangsung, maka kan tidak mungkin ada friksi antara negara dengan militer atau antara elit negara dengan militer. Kita tidak pernah membayangkan seorang presiden Pak Harto melakukan takbir misalnya, itu tidak pernah dilakukan. Dan tidak pernah terjadi bahwa sebuah organisasi Islam didirikan dengan rapat di kabinet seperti ICMI lalu kemudian pembukaannya dilakukan oleh Presiden dan penutupannya oleh Wapres. Kita melihat seperti ini. Jadi sebenarnya perkembangan yang baru ini bukan sebuah usaha politisasi Islam tok untuk menguatkan negara tetapi adalah sebuah usaha untuk menemukan "identitas pribumi" dari negara itu sendiri. Jadi di dalam konteks lain ketika proses pengasingan, proses materialisasi dengan pembangunan, industrialisasi dan dengan proses modalisasi yang berlangsung secara terus-menerus itu tadi, tiba-tiba lembaga kenegaraan menjadi susah mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini lembaga, lembaga apa? Lembaga yang merupakan *extension* dari kekuatan luar ataukah lembaga yang merupakan ujung tombak dari proses pembaratan masyarakat, atau apa? Kemudian caranya bagaimana? Negara harus "dibalut" dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat. Karenanya proses yang berlangsung sekarang ini adalah sebuah proses pribumisasi negara supaya negara dikenal oleh masyarakat melalui simbol-simbolnya. Sekarang saya mau mengemukakan misal kepada anda. Dengan dilakukannya tahlilan di Jalan Cendana dan kemudian disiarkan oleh TV dan kaum NU di

desa-desa itu melihat itu, apa artinya? Artinya bahwa negara kemudian menampakkan dirinya melalui simbol yang berbagi dengan masyarakat. Sehingga wujud negara yang sebelumnya sangat asing itu menjadi lebih dikenal. Kesan saya apa yang berlangsung sekarang ini adalah sebuah tindakan-tindakan secara kultural yang jauh lebih realistis daripada yang "idealistik", yang ingin memodernisasikan masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang secara kultural ditolak orang. Dan gejala semacam ini bukan hanya gejala Indonesia. Usaha Inggris misalnya tetap mempertahankan *prince* walaupun hanya sebagai simbol adalah usaha mempertahankan identitas yang sudah ada. Dan untuk masyarakat Timur, itulah yang dilakukan oleh Jepang. Dimana kekuatan *Tenno Heika* masih dipakai sebagai simbol, sebagai pengantar proses modernisasi itu. Supaya proses modernisasi itu tidak berlangsung bergejolak seperti ini yang tiba-tiba lekang dari konteksnya. Yang berlangsung di Indonesia kesan saya adalah itu.

Orang-orang pun menilai proses itu sebagai proses yang positif. Namun mereka menyangkan bahwa hal itu masih pada tataran *wadag* saja, pada tataran simbol yang dalam bahasa anda "pembalutan", belum menyentuh esensi. Di mana masih kita temukan penyimpangan dalam praktek kenegaraan yang itu tidak searah dengan cita-cita Islam. Menurut Anda bagaimana?

Jawaban yang paling mudah adalah karena ini baru dimulai. Baru dimulai dan masih berproses. Tetapi sebenarnya di atas segala-galanya proses substansialisasi dari persoalan ini belum ditemukan secara konseptual. Dalam pengertian bahwa orang mengatakan sekarang negara Indonesia aparturnya semakin lama semakin "hijau". Tingkat orang naik haji semakin tinggi, jumlah para pejabat yang naik haji semakin lama semakin banyak, mereka pun berlomba-lomba untuk lebih dekat dengan kalangan-kalangan agama, mereka berlomba-lomba ke dunia pesantren, terutama waktu Pemilu. Itu adalah sebuah tindakan-

tindakan kongkrit yang dapat mereka lakukan dengan segera. Jadi bukan salah mereka kalau mereka hanya melakukan itu. Karena apa? Karena kaum intelektual terutama di kalangan santripun tidak siap memberikan arti yang substansial terhadap hal itu. Apa dong konsep yang harus dikemukakan? Konsep yang harus dimamah lebih dulu, dimanufactured, dikelola, diolah dulu, yang bukan semata-mata diambil dari ajaran Islam lalu dengan corak yang "telanjang" Islam itu dikemukakan. Jadi sebenarnya proses substansialisasi dari corak keislaman "moderen" yang sesuai dengan lanskap pemikiran universal, demokrasi, HAM dsb. belum siap. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan belum merupakan wacana yang mendesak yang dibutuhkan oleh para elit negara. Nah terakhir, ada satu hal lagi yang belum dimainkan oleh kalangan Islam; adalah bagaimana kekuatan Islam, ummat Islam berperan sebagai civil society, sebagaimana yang digagas oleh Mas Aswab Mahasin. Ini yang belum dilaksanakan. Artinya belum diejawantahkan di dalam realitas. Nah, tadinya di dalam hal-hal yang semacam ini orang banyak berharap selain kepada Nurcholish Madjid adalah kepada Abdurrahman Wahid, karena dia punya massa yang begitu besar. Dan memang jargon dari gerakan-agerakannya seperti itu di masa lalu, tapi kemudian, ya, terjadi pembelokan yang luar biasa, yang secara kasat mata orang luar tidak paham. Tetapi satu hal, target ummat Islam terpenting menurut saya yang relatif sudah dikuasai adalah negara tidak memusuhi Islam. Menurut saya, lepas dari berbagai kritik yang ada, itu adalah suatu yang positif yang harus diolah lebih lanjut secara kreatif untuk kepentingan bersama. Sebab, sejauh negara mencurigai Islam maka kekuatan-kekuatan yang ada dalam Islam menjadi hancur.

Tadi Anda mengatakan, ini masih proses. Berarti Anda masih mempunyai harapan bahwa ini akan terus berlangsung menuju kondisi yang lebih baik. Bagaimana pandangan Anda tentang strategi masuk dalam kekuasaan dan kemudian melakukan Islamisasi di sana, apakah itu masih

menjanjikan dalam negara yang kooptatif ini?

Itu yang saya katakan tadi bahwa akomodasi Islam itu tadi sebenarnya target utamanya bukan kemudian masuk secara sepenuhnya ke dalam negara, lalu menjadi bagian yang integral dengan negara. Bahwa kemudian ada yang masuk ke sana, tidak menjadi persoalan apa-apa. Tetapi menurut saya yang terpenting adalah menciptakan landasan substansialisasinya. Sebab, ini yang kemudian merupakan bagian atau agenda pekerjaan dari orang-orang bebas. Orang-orang Islam atau santri yang bebas. Karenanya proses kritis itu harus tetap berlangsung. Tanpa ada proses kritis secara sederhana bukan saja orang-orang yang "di dalam" akan melakukan tindak penyimpangan, tetapi juga tanpa proses kritis tidak akan ada kreatifitas lebih lanjut. Dan bibit yang berlangsung sekarang ini termasuk bibit-bibit muda di kalangan santri sudah menjanjikan sesuatu yang lain. Kinerja Islam yang lain. Yang bukan lagi kinerja yang sekedar kontinuitas dari masa lalu. Saya optimisnya di situ. Dan di dalam beberapa hal, saya kemukakan, itu sebenarnya adalah kelanjutan gagasan-gagasan Nurcholish Madjid tentang apa yang kita sebut "Islam humanis" itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Cak Nur itu mengembangkan sebuah gairah keislaman yang bersifat humanis. Gejala itu muncul pada generasi muda ini tadi. Walaupun hal yang mengantarnya adalah persoalan-persoalan politik.

Maksud Anda?

Persoalan politik di sini adalah bahwa ada semacam kegelooan, kecewa karena ketika Islam diakomodasikan oleh negara, pada umumnya yang diuntungkan adalah kalangan yang disebut dengan kaum modernis tadi. ICMI berdiri dan segala macam itu hanya mengangkat kalangan modernis. Sementara Abdurrahman Wahid kemudian menolak. Dan pada umumnya, 3 atau 4 tahun yang lalu, hampir seluruh kalangan NU, terutama kaum muda NU, pada masa itu pun kemudian melihat ICMI dengan permusuhan.

Lalu reaksinya adalah terjadinya reinteleksualisasi di kalangan kaum muda Nahdliyyin itu tadi. Karena mentornya adalah Abdurrahman Wahid. Ketika Abdurrahman Wahid berbicara atas nama bangsa dan negara lalu berkoalisi dengan pusat-pusat intelektual di luar Islam, maka kaum muda santripun kemudian bertautan dengan pusat-pusat intelektual itu tadi. Sebagai akibat interaksi yang sebenarnya mungkin tidak terlalu disengaja ini, terjadilah proses inteleksualisasi. Sebagai kompensasi dari merasa tidak terakomodasi di dalam kekuasaan itu. Nah inilah yang kemudian berlangsung, menurut saya. Sebagaimana selalu terlihat di dalam sejarah, hal-hal yang tidak terduga-duga itu bisa juga merupakan sesuatu yang bermanfaat. Saya berharap penuh sekali pada kalangan muda santri yang kemudian akan muncul dan memunculkan sebuah corak pemikiran Islam yang lebih humanis. Dari hanya sekedar mempersoalkan terakomodasi atau tidak golongan-golongan tertentu di dalam negara.

Orientasi, model pemikiran ummat Islam di Indonesia sangat plural dan sangat rumit. Mungkin Anda bisa memetakan dan memberikan gambaran mengenai pluralitas bagaimana ummat Islam memandang negara ini?

Saya terus terang tidak tahu banyak tentang itu. Apalagi kalau kita melihat fenomena kampanye selama ini, bagi saya, itu sesuatu yang mengejutkan sekali dan juga bagi para ilmuwan sosial. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa ternyata aspirasi masyarakat menjadi sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Mereka tidak membayangkan terjadinya aksi-aksi kekerasan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dan itu di luar prediksi semua orang. Pembangunan jalan terus, hasil-hasil pembangunan merata. Tetapi kenapa justru konflik dan penolakan terhadap dominasi itu terjadi di wilayah perkotaan yang dianggap pembangunannya sangat maju. Di dalam konteks Islampun, dengan bercermin pada peristiwa kampanye ini tadi, kita menjadi tidak faham tentang peta-peta itu. Tapi yang jelas bahwa peta

yang menyederhanakan pandangan dan membaginya hanya pada modernis dan tradisional itu menjadi tidak relevan lagi. Jadi maksud saya, ada sesuatu yang tidak kita fahami lagi di dalam situasi atau peta aspirasi, peta pemikiran masyarakat kita sendiri. Karena itu saya tidak begitu berani membuat peta dengan fakta-fakta di atas meja.

Tetapi sesuatu yang baru sedang muncul. Wujud sesuatu yang baru itu adalah antara lain bahwa gagasan-gagasan dan peta-peta pemikiran keislaman semakin lama akan semakin banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang bersifat universal. Misalnya kita boleh mengambil kasus KBNU yang membuat pernyataan tentang Pemilu; bahwa memilih adalah hak bukan kewajiban, buat saya itu sebuah poin yang penting dari perkembangan pemikiran tadi. Maka saya ingin mengatakan bahwa gagasan yang semacam itu, itu tidak berasal dari belakang artinya tidak ada presedennya. Mereka menemukan gagasan-gagasan semacam itu bukan karena mereka melihat ke belakang, tapi karena mereka melihat ke atas, keluar. Jadi bukan ke belakang tetapi ke depan. Ketika mereka berbenturan dengan khazanah intelektual yang lebih luas. Nah inilah yang kemudian akan menjadi salah satu corak yang akan mempengaruhi format dari peta pemikiran Islam tentang negara di masa depan. Jadi kalau tidak mau dibilang warna Barat, ya warna universalnya semakin lama akan semakin terlihat. Tetapi pada saat yang sama kita juga akan masih mendapatkan alur-alur pemikiran lama dalam konfigurasi peta yang sama. Misalnya, kelompok yang memperlakukan Islam hanya sebagai pengesah akan tetap ada. Atau misalnya, kelompok-kelompok lain yang mengatakan enggak ada hubungannya antara kehidupan politik, kehidupan kenegaraan dengan kehidupan keagamaan, itu masih akan tetap ada. Tetapi

yang ingin saya gugat adalah metodologi berpikir. Kita sudah dimanjakan oleh asumsi-asumsi yang selama ini mengatakan bahwa kalau negara semakin memperlihatkan dirinya "hijau" maka ia akan berbagi simbol yang sama dengan masyarakat.

kemungkinan besar, terutama pada tingkat publik kota, yang akan semakin menonjol adalah gejala baru seperti yang saya tunjukkan tadi itu.

Fenomena gejolak sosial di bawah, para ahli sepakat bahwa itu adalah ketidakpuasan terhadap sistem negara dan ini akan berpengaruh kepada legitimasi rakyat yang

mayoritas ummat Islam itu terhadap keberadaan negara dan keberadaan sistem. Menurut Anda?

Saya tidak menjawab itu, tapi yang ingin saya gugat adalah metodologi berpikir. Kita sudah dimanjakan oleh asumsi-asumsi yang selama ini mengatakan bahwa kalau negara semakin memperlihatkan dirinya "hijau" maka ia akan berbagi simbol yang sama dengan masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, walaupun masa kampanye ini tidak bisa kita jadikan ukuran yang konstan, tetapi di dalam beberapa hal ia memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Jadi seakan-akan itu terjadi *rejection*, penolakan terhadap beberapa unsur negara di dalamnya. Usul saya, segala sesuatu harus ditinjau ulang, tidak bisa lagi melihat dengan kaca mata konvensional. Hubungan antara masyarakat dengan negara atau keakraban hubungan negara dengan masyarakat muslim tidak bisa diukur dengan banyaknya intelektual-intelektual muslim, ulama-ulama berhubungan baik dengan *umara*. Tetapi pandangan dan aspirasi masyarakat itu harus diperhatikan. Yang terjadi sepanjang kampanye yang kita lihat sekarang ini adalah *anomali*. Di mana hubungan antara pemimpin dengan massa tidak nyambung, tidak terkait. Jadi yang harus diubah sesungguhnya adalah metode berpikir di dalam menangkap realitas. Sebab dengan metodologi konvensional, realitas ternyata tidak bisa tertangkap. Itu saja *deh*, terima kasih. □